



PENETAPAN

Nomor 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Mapillie, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 4 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-566/Kua.31.03.08/PW.01/08/2018. bertanggal 27 Agustus 2018 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 18 tahun, agama

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Mobil, Dusun Mapillie, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada bertempat kediaman di Dusun Mapillie, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 4 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya;

4. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Sultan bin Nurdin) sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON bersedia dinikahi oleh Sultan bin Nurdin;
- Bahwa ANAK PEMOHON sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun umur ANAK PEMOHON sekarang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON telah melamar dan pihak keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menerima dengan baik;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah sanggup menafkahi calon istri (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) karena telah mempunyai penghasilan sebagai buruh penggiling padi;

Bahwa calon istri anak Pemohon tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-566/KUA.31.03.08/PW.01/08/2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 27 Agustus 2018, telah dimeterai dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasman, Nomor 7604082212110019 tanggal 16 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.2;

B. SAKSI- SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Lampa, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai calon besan Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu kandung dari Sultan bin Nurdin;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Sultan bin Nurdin, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli dengan alasan anak Pemohon masih di bawah batas umur pernikahan bagi laki-laki yaitu masih berumur 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi karena calon istri anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh saksi sebagai orang tua calon istri anak Pemohon;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Pemohon adalah perawan;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sekarang sudah punya penghasilan sebagai buruh penggiling padi dan sanggup menghidupi calon istrinya setelah menikah;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Massandra, Desa Bonne-bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Sultan bin Nurdin, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Pemohon masih di bawah batas umur pernikahan bagi laki-laki yaitu masih berumur 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya suka sama suka dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena calon istri anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga calon istri anak Pemohon;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sekarang bekerja sebagai

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruh penggiling padi dan telah mempunyai penghasilan cukup;
Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan
mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal
ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada
dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan
bahwa anak Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun
akan melangsungkan pernikahan dengan calon istri, akan tetapi mendapat
penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali
Mandar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar
Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon
dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil
dan Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir
terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon (calon suami)
telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti
surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 1,
merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai
penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten
Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatatkan
perkawinan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK
PEMOHON, karena ANAK PEMOHON belum mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan ANAK PEMOHON yakni sebagai ibu dan anak kandung, yang mana anak Pemohon terlahir pada tanggal 28 Oktober 2000 yang hingga sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 3,4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1, dan P.2 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON kini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (Sultan bin Nurdin) dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah bekerja sebagai buruh penggiling padi;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima dengan baik serta mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai terbukti dengan hamilnya calon istri selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
 النَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya".

3. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ا
 ر
 -
 -
 -
 ض
 -
 -
 ر
 ر
 ر
 ي
 ز
 ا
 ل



Artinya “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas selaras pula dengan substansi maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi batas baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki-laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan, baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa perubahan suara dan telah mimpi basah bagi anak laki-laki dapat dinilai sebagai pertanda baligh;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa “Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertainya, sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”. Menurut konsep hukum adat “Apabila kedewasaan itu dihubungkan

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan kawin, hukum Adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu melakukan hubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa”.;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut, meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan namun telah mimpi basah maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan untuk hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah keluarga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk pernikahan anaknya dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Nirwana, S.H.I.

ttd

Samsidar, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

An. Panitera Pengadilan Agama Polewali,
Panitera Muda Hukum

Drs. M. As'ad

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)